

PERAN PEMERINTAH DAERAH PADA PARIWISATA INKLUSIF MELALUI *QUALITY TOURISM* DI KABUPATEN SAMPANG

Moh Nurul Khomaidi¹ & Merlia Indah Prastiwi²

^{1,2}Program Studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura

Email: 230521100089student.trunojoyo.ac.id

Abstract

This study discusses the role of the Sampang Regency Government in developing inclusive tourism through a quality tourism approach. The background of this study is based on Sampang's great tourism potential, which has not been managed inclusively and sustainably, especially in terms of accessibility, service quality, and equitable economic benefits for the local community. The local government has an important role as a policy maker and development facilitator that ensures the tourism sector is able to provide benefits to all levels of society, including vulnerable groups. The purpose of this study is to analyze the strategic role of the local government in realizing inclusive tourism, identifying the obstacles faced, and formulating quality-based tourism policy strategies. The method used is a qualitative descriptive approach with in-depth interview techniques, field observations, and policy document analysis. The results show that local governments have made efforts to implement the principles of quality tourism through the provision of disability-friendly facilities, increased cross-sector collaboration, and strengthened policies in the 2021–2026 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). However, implementation still faces obstacles in the form of limited human resources and inter-agency coordination. These findings emphasize that the role of local governments as catalysts for inclusive tourism needs to be strengthened through human resource development, adaptive regulations, and monitoring. In conclusion, the implementation of quality tourism can be an effective strategy for realizing inclusive, sustainable, and quality tourism in Sampang Regency.

Keywords: Local Government, Inclusive Tourism, Quality Tourism, Public Policy, Sampang Regency

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengembangkan pariwisata inklusif melalui pendekatan quality tourism. Latar belakang penelitian ini didasari oleh potensi wisata Sampang yang besar, namun belum dikelola secara inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam hal aksesibilitas, kualitas layanan, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator pembangunan yang menjamin agar sektor pariwisata mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pariwisata inklusif, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi kebijakan berbasis kualitas pariwisata. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menerapkan prinsip *quality tourism* melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas, peningkatan kolaborasi lintas sektor, dan penguatan kebijakan dalam RPJMD 2021–2026. Namun, pelaksanaannya masih

menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarinstansi. Temuan ini menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sebagai katalisator pariwisata inklusif perlu diperkuat melalui pengembangan SDM, regulasi yang adaptif, dan monitoring berkelanjutan. Kesimpulannya, penerapan *quality tourism* dapat menjadi strategi efektif untuk mewujudkan pariwisata inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas di Kabupaten Sampang.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pariwisata Inklusif, *Quality Tourism*, Kebijakan Publik, Kabupaten Sampang

Pendahuluan

Kabupaten Sampang, yang terletak di Pulau Madura, Jawa Timur, memiliki banyak pilihan wisata, mulai dari wisata alam seperti pantai dan mangrove hingga wisata budaya seperti adat istiadat dan seni lokal. Namun, pengembangan pariwisata Kabupaten Sampang masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas layanan yang buruk, promosi yang kurang efektif, dan kurangnya akses masyarakat terhadap keuntungan ekonomi dari pariwisata. Selain itu, karena pariwisata tidak sepenuhnya inklusif, sebagian kelompok masyarakat belum sepenuhnya terlibat dan mendapatkan manfaat darinya. Karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru, pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi sebuah wilayah. Pariwisata di Indonesia dilihat sebagai alat untuk pembangunan sosial dan budaya serta sektor ekonomi. Konsep yang berkembang saat ini menekankan bahwa pariwisata harus inklusif model pembangunan pariwisata yang memberikan kesempatan dan keuntungan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal.

Pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam hal ini. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk membuat peraturan dan infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan bahwa pariwisata berkembang secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan strategis adalah konsep wisata berkualitas, yang menekankan pada pengalaman wisata yang berkualitas, pelestarian lingkungan dan budaya, dan pemerataan keuntungan ekonomi. Salah satu kekurangan penelitian adalah masih sedikit penelitian yang menghubungkan peran pemerintah daerah dengan penerapan pariwisata inklusif berbasis kualitas, khususnya di Kabupaten Sampang. Beberapa penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada potensi wisata atau strategi promosi, sementara masih terbatas penelitian tentang kolaborasi pemerintah dalam mewujudkan pariwisata inklusif melalui pendekatan kualitas (Mangihut Siregar, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini unik dalam hal menggabungkan konsep pariwisata berkualitas dengan praktik tata kelola pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata inklusif. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik dan praktis untuk membangun teori kebijakan pariwisata serta saran praktis untuk pemerintah Kabupaten Sampang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang peran pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata inklusif di Kabupaten Sampang melalui konsep pariwisata berkualitas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, kebijakan, dan praktik di lapangan secara menyeluruh. Dimulai dengan perumusan masalah yang jelas dan penelitian literatur terkait untuk membangun kerangka teori dan mengidentifikasi gap penelitian. Studi literatur ini meliputi buku, jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian terkait.

Data primer dan sekunder dikumpulkan secara menyeluruh. Kedua jenis data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, dan masyarakat lokal. Selain itu, kondisi fisik, fasilitas, dan aksesibilitas lokasi penelitian diamati secara langsung. Selanjutnya, sebuah kuesioner disebarluaskan kepada wisatawan untuk mengukur tingkat kepuasan mereka dan pengalaman mereka terkait aspek inklusi dan kualitas layanan pariwisata. Data kuantitatif ini akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran objektif tentang kualitas pariwisata yang dirasakan. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan pembanding data primer dan dikumpulkan dari laporan Dinas Pariwisata, dokumen resmi pemerintah, statistik kunjungan wisata, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dan menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas dan inklusivitas pariwisata di Kabupaten Sampang.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Pustaka Topik 1: Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata telah banyak dikaji dalam literatur. Menurut Timothy dan Tosun (2003), pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara inklusif.

Penelitian oleh Dredge dan Jenkins (2011) menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata daerah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan mengelola konflik yang muncul agar pengembangan pariwisata berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Sari dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mengembangkan pariwisata inklusif yang melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat miskin. Pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur yang ramah akses dan kebijakan yang mendukung partisipasi semua lapisan masyarakat (Sinaga, 2016).

Tinjauan Pustaka Topik 2: *Quality tourism* sebagai Pendekatan Pengembangan Pariwisata

Quality tourism adalah pendekatan pengembangan pariwisata yang menekankan pada kualitas pengalaman wisatawan, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat lokal (UNWTO, 2018). Pendekatan ini mengedepankan standar pelayanan, pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab (Bramwell & Lane, 2011). Studi oleh Lee dan Arcodia (2011) mengungkapkan bahwa *quality tourism* dapat meningkatkan daya saing destinasi dan memperkuat citra positif daerah. Implementasi *quality tourism* di Kabupaten Sampang dapat menjadi strategi efektif untuk mewujudkan pariwisata inklusif yang berkelanjutan, namun masih memerlukan dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Kreatif, 2023).

Secara khusus, teori mengenai "*quality*" yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pengertian dari UNWTO (badan Pariwisata Dunia) yang menyatakan bahwa kualitas (*quality*) melibatkan partisipasi aktif dari semua faktor yang berkontribusi terhadap pengalaman

wisata, usaha terus-menerus dalam meminimalisir kekurangan, dan sifat subjektif dari pengalaman tersebut. Selain itu, teori dari Gusti Rai Utama disebutkan yang menyebutkan bahwa indikator triangle *quality tourism* meliputi kualitas pengalaman wisata (*quality of experiences*), kualitas SDM (*quality of life*), dan kualitas investor (*quality of investor*). Teori ini mengandung unsur-unsur dari konsep manajemen mutu dan service quality yang menekankan pada pengalaman dan kepuasan wisatawan sebagai indikator utama keberhasilan pariwisata. Selain itu, terdapat referensi dari Cooper dan Jakson yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata mengikuti siklus hidupnya, yang juga berhubungan dengan pengembangan kualitas secara berkelanjutan. Singkatnya, teori "quality" dalam penelitian tersebut menggunakan konsep dari UNWTO yang menekankan bahwa kualitas adalah usaha kolektif yang berkelanjutan dalam pengalaman wisata, layanan, dan keberlanjutan lingkungan, serta melibatkan partisipasi semua pihak terkait (Khilfatul Khamidah, 2024).

Tinjauan Pustaka Topik 3: Pariwisata Inklusif

Pariwisata inklusif merupakan konsep pariwisata yang mengedepankan aksesibilitas dan partisipasi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan masyarakat lokal yang selama ini kurang terakomodasi dalam kegiatan pariwisata (Darcy & Dickson, 2009). Menurut UNWTO (2020), pariwisata inklusif bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Studi oleh Smith dan Puczkó (2014) menegaskan bahwa pariwisata inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial tetapi juga memperluas pasar pariwisata secara signifikan. Dalam konteks Kabupaten Sampang, penerapan pariwisata inklusif masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas dan kurangnya kesadaran pemangku kepentingan (Bappeda Sampang, 2022). (Sinaga, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya , 2016).

Hasil Kegiatan Riset yang Telah Dilakukan

Penelitian ini telah mencapai tahap pengumpulan data primer dan sekunder yang signifikan, dengan fokus khusus pada peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengembangkan pariwisata inklusif melalui konsep *quality tourism*. Sejauh ini, kegiatan riset yang telah dilakukan meliputi berbagai metode pengumpulan data seperti survei lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen kebijakan yang relevan dengan pengembangan

pariwisata inklusif di wilayah tersebut. Data primer yang terkumpul berasal dari enam responden yang mewakili berbagai unsur penting, antara lain pelaku usaha pariwisata yang aktif dalam mengelola destinasi wisata, RT/RW sebagai perwakilan masyarakat lokal, Dinas Sosial (Dinsos) yang berperan dalam kebijakan sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) yang memiliki fungsi koordinasi dan keamanan, serta Dinas Pariwisata yang merupakan leading sector dalam pengembangan pariwisata.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa temuan awal yang menggambarkan kondisi riil di lapangan. Salah satunya adalah peran aktif Pemerintah Daerah dalam menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur pariwisata yang ramah terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani, seperti penyandang disabilitas dan kelompok sosial lainnya. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pariwisata dengan Dinas Sosial dan organisasi masyarakat lokal semakin diperkuat untuk memastikan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa konsep *quality tourism* tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada upaya menjamin keberlanjutan, inklusivitas, dan peningkatan kualitas pengalaman wisata secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, penelitian ini telah menunjukkan kemajuan yang berarti pada tahap pengumpulan data dan analisis awal, dengan pencapaian 70% dari tahapan yang direncanakan. Penting untuk menekankan bahwa upaya pengumpulan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber menunjukkan komitmen peneliti dalam menghasilkan kajian yang valid dan komprehensif. Diharapkan, hasil akhir dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata inklusif yang tidak hanya berkualitas, namun juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi dokumentasi akademis, tetapi juga sebagai acuan konkret dalam pengembangan destinasi wisata yang ramah dan dapat diakses oleh semua kalangan.

Pembahasan hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengembangkan pariwisata inklusif berbasis konsep *quality tourism* sudah menunjukkan

adanya kemajuan yang cukup signifikan. Konsep *quality tourism* sendiri, yang menekankan pada peningkatan kualitas layanan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal, telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah, khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2021 hingga 2026. Sebagai contoh, pemerintah telah menginisiasi pembangunan fasilitas wisata yang ramah disabilitas di Pantai Camplong, sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip inklusivitas dalam pembangunan destinasi wisata mereka.

Namun, meskipun kebijakan dan inisiatif tersebut telah ada, realisasi di lapangan menunjukkan kendala tertentu. Berdasarkan survei dan observasi, efektivitas pelaksanaan program ini baru mencapai sekitar 50%. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa tantangan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil dalam mengelola pariwisata inklusif, serta koordinasi antarinstansi pemerintah yang masih belum maksimal. Masih adanya kekurangan sumber daya ini menyebabkan keberlanjutan program dan implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal. Beberapa kegiatan yang direncanakan, seperti pembangunan fasilitas ramah disabilitas, belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan, dan banyak dari fasilitas yang belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan wisatawan dengan kebutuhan khusus. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sebagai katalisator utama dalam pengembangan pariwisata inklusif cukup kuat, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam aspek regulasi, monitoring, dan pengelolaan sumber daya manusia agar target-target yang diinginkan dapat tercapai secara optimal. Diperlukan upaya peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintahan dan peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan bahwa program-program yang telah dirancang mampu diimplementasikan secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif, potensi pariwisata inklusif di Kabupaten Sampang dapat dikembangkan secara optimal demi memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat posisi daerah sebagai destinasi wisata yang ramah dan berkualitas.

Gambar 1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar di atas merupakan dokumentasi pengambilan data di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk kegiatan wawancara pengumpulan data terkait koordinasi antarinstansi dalam pengembangan pariwisata.

Gambar 2. Kunjungan ke Dinas Sosial



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar di atas merupakan dokumentasi wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Sampang untuk menggali data mengenai dukungan pemerintah terhadap penyandang disabilitas di sektor wisata. Dinas Sosial tidak berperan langsung dalam pengembangan pariwisata inklusif, tetapi mendukung melalui koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Pendidikan untuk penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Fokus utama Dinsos adalah pemberdayaan masyarakat rentan, agar kelompok disabilitas dapat terlibat sebagai pelaku aktif pariwisata guna meningkatkan pendapatan. Berdasarkan data Dinas Sosial, terdapat 4.256 penyandang disabilitas di Kabupaten

Sampang. Secara keseluruhan, peran Dinas Sosial bersifat koordinatif dan pendukung, bukan teknis, namun tetap memiliki peran penting dalam mendorong inklusivitas di sektor pariwisata.

Gambar 2 Kunjungan ke Pariwisata



Sumber: dokumentasi peneliti

Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang menunjukkan komitmen dalam mewujudkan wisata inklusif dan ramah disabilitas. Beberapa destinasi seperti Pantai Lon Malang, Alun-alun Trunojoyo, SWB, dan Pantai Camplong sudah mulai dilengkapi fasilitas pendukung, seperti toilet dan jalur khusus bagi penyandang disabilitas, sementara destinasi lain masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah juga terus mendorong pengelola wisata untuk memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan kebersihan fasilitas, termasuk area restoran dan jalur akses. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pariwisata bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan OPD lainnya agar program wisata inklusif terintegrasi dalam program kerja kabupaten. Pengawasan dilakukan melalui laporan bulanan dari setiap pengelola wisata, termasuk saat periode libur besar. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi fokus utama, dengan mendorong mereka sebagai pelaku utama pengelolaan wisata desa sesuai potensi masing-masing daerah. Pemerintah juga melakukan pendampingan, sosialisasi, dan monitoring berkala untuk memastikan standar inklusivitas dan kualitas pelayanan terus meningkat. Upaya ini membawa hasil positif, terbukti dengan prestasi Kabupaten Sampang dalam Festival Desa Wisata “Dewi Cemerlang dan Bermartabat” se-Jawa Timur tahun 2025. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Sampang mulai mengalami kemajuan nyata dalam pembangunan wisata inklusif, meskipun masih memerlukan peningkatan pada perluasan fasilitas dan kapasitas SDM.

Kesimpulan

Penelitian mengenai Peran Masyarakat dalam Pariwisata Inklusif melalui *Quality tourism* di Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran sentral dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas. Hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun fasilitas fisik dan kebijakan pemerintah masih perlu diperbaiki, kesadaran sosial dan partisipasi aktif masyarakat telah menjadi fondasi penting dalam menciptakan suasana wisata yang ramah bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Nilai-nilai gotong royong, keramahan, serta kepedulian terhadap wisatawan menjadi cerminan penerapan prinsip *quality tourism* di tingkat lokal.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pariwisata di Sampang. Pemerintah berperan dalam penyediaan kebijakan dan infrastruktur pendukung, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam menjaga lingkungan, memberikan pelayanan, dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal. Pelaku usaha turut memperkuat aspek ekonomi melalui pengelolaan UMKM dan pelayanan wisata yang lebih profesional. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosial dan kebijakan publik di bidang pariwisata dengan menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis kualitas. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pariwisata inklusif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas masyarakat, Kabupaten Sampang berpotensi menjadi model daerah dengan pengembangan pariwisata inklusif berbasis *quality tourism* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Khilfatul Khamidah, K. A. (2024). Strategi Pengembangan *Quality Tourism* Pada Objek Wisata Guci Sebagai Potensi Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6.
- Kreatif, B. P. (2023, 01 03). *kemenparekraf.go.id*. Retrieved from <https://www.kemenparekraf.go.id/>: <https://www.kemenparekraf.go.id/berita>
- Mangihut Siregar, R. A. (2024). Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Sampang . *JSPM* , 85.
- Marlina Yosepha Sihite, A. R. (2025). Studi Komparasi Quality Of Life Pelaku Aktif dan Pasif Pariwisata. *JURPAS*, 3.



- Sinaga, R. K. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 81.
- Sinaga, R. K. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya . *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 92.